

Voluntary Land Donation (VLD) as a Form of Land Acquisition

John Butler
World Bank

(with thanks to Indira Dharmapatni
WB Indonesia/PNPM)



Motivations for using Voluntary Land Donation (VLD) include:

- Community development projects may require in-kind land contributions from the community (strengthens cooperation and project ownership)
- To stretch limited project funding where land acquisition is part of the overall project cost (government roads projects, for example)

The Voluntary Nature of Land donations may be questioned when:

- The owner of land to be donated cannot be given the power of choice and the ability to say “no” if they do not agree with the donation
- “Voluntary” is more likely when construction is not location specific. Because if owners object to one location, it can be built on another location where they agree (ex: a school can be sited in different locations but a reservoir for a dam might not be)
- “Voluntary” is less likely in cases of location-specific infrastructure. When the owner cannot say no if there is only one suitable project location for building, **then** the chance of coerced acceptance / or eventual expropriation is much greater

VLD is popular in Community Driven Development (CDD). Indonesia has a large WB CDD Programs (PNPM)

- **National Urban and Rural Community Empowerment Programs since 2008**

- 13,000 urban wards -- 21 million people
- 4,800 sub-districts – 60,000 villages

- **Water and sanitation project**

4,000 rural villages, access to water for 3.5 million and to sanitation for 2 million

- **Fast growing portfolio**

\$ 2.6 billion since 2006 → 1.5 billion during 2010-2011, high percentage of GOI contribution

- **These programs involve significant VLD**

Types of community projects Involving Land Donation



Challenges and Risks of Community VLD

- Community's understanding of VLD and its consequences (pros and cons), poorly documented land decisions can divide community
- How to ensure that “voluntary” is “truly” a voluntary decision to donate or not donate, made without coercion
- Donated by whom (clans, families, individuals) and for what (use with limitations, transit, right of return)
- How to ensure that the project provides various options/sites for project infrastructure
- Legal issues: taxes, is there a need to transfer land title?
- Lack of documentation of key decisions may lead to complaints

GRM (Grievance redress) in Indonesia CDD Projects

- GRM at three levels – village, city, national
- Complaints box, text/phone number, email/project web
- Facilitators/consultants at local and national levels (capacity building)
- Complaints follow-up, responses recorded

Guidance through project manuals and other instruments

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN JERENDAL CIPTA KARYA

**BAGIAN B
PELAKSANAAN
LAPANGAN**

**PEDEMAN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
PERKOTAAN**

**BAB VI
PENGAMANAN**

Desain FNPM Mandiri Perkotaan disusun sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tingkat lokal termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat, tidak dapat dihindari bahwa fasilitator akan berhadapan langsung dengan penduduk asli setempat. Penduduk asli sebagai kelompok khusus pasti diterapkan pendekatan yang berbeda dan didukung secara khusus. Tujuan dari pendekatan khusus bagi penduduk asli adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa penduduk asli memperoleh manfaat dari keberagaman program dan;
2. Menghindarkan atau meminimalkan potensi pengaruh atau dampak FNPM Mandiri Perkotaan yang merugikan bagi penduduk asli.

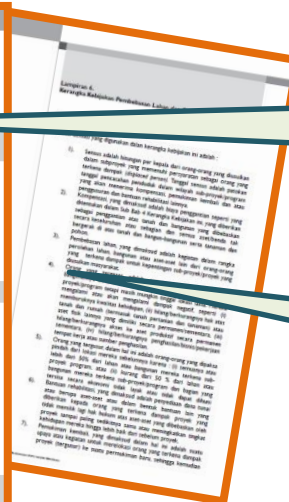
Urutan lengkap tentang pedoman perlakuan penduduk asli dapat dilihat pada lampiran 3.

Sebagai program yang tanggap dan sensitif, FNPM Mandiri Perkotaan berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek di area miskin di perkotaan. Melalui BLM, FNPM Mandiri Perkotaan berharap dapat menyediakan pembangunan infrastruktur (gagu untuk atau sub-proyek yang disetujui KSM) adalah Rp. 50 juta. Kegiatan ekonomi produktif dan program sosial yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk membuat suatu kegiatan yang skala besar dan kegiatan yang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di lokasi misal selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu program ini oleh Bank Dunia diberi kategori B untuk klasifikasi lingkungan hidup.

Prosedur pengelolaan lingkungan yang resmi digunakan di Indonesia secara umum sama dengan prosedur yang diterapkan oleh Bank Dunia dalam pendekatan FNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena program ini relatif kecil, maka diharapkan tidak ada dampak yang signifikan. Namun demikian, dalam hal ini FNPM Mandiri Perkotaan akan membatalkan mekanisme pemantauan, meninjau serta menerapkan prosedur pendekatan untuk tingkat risiko yang mungkin terjadi untuk menjamin setiap masalah lingkungan yang terjadi dapat diantisipasi.

Urutan lengkap tentang prosedur pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada lampiran 4 buku ini.

Sebagai sebuah program, FNPM Mandiri Perkotaan akan mendukung sejumlah bantuan skala kecil (sub-proyek) terutama di wilayah Perkotaan. Melalui komponen dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), FNPM Mandiri Perkotaan akan membantu usaha kegiatan masyarakat yang ada dalam FNPM Mandiri Perkotaan/ desa setempat sarana prasarana dasar lingkungan, program sosial maupun kegiatan

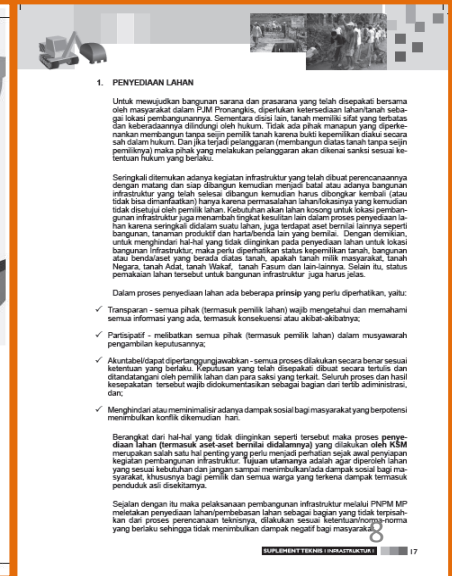
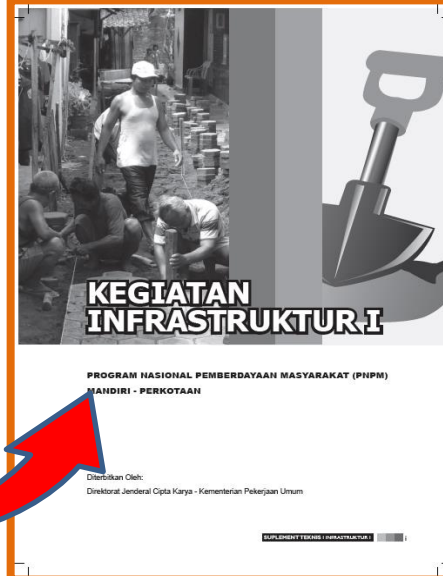


Safeguards, policy, standards in main text

details in annex

FNPM Urban General Project Guidelines

Technical Manual for Infrastructure



2. Technical Guidelines for Safeguards

Facilitation, support, training

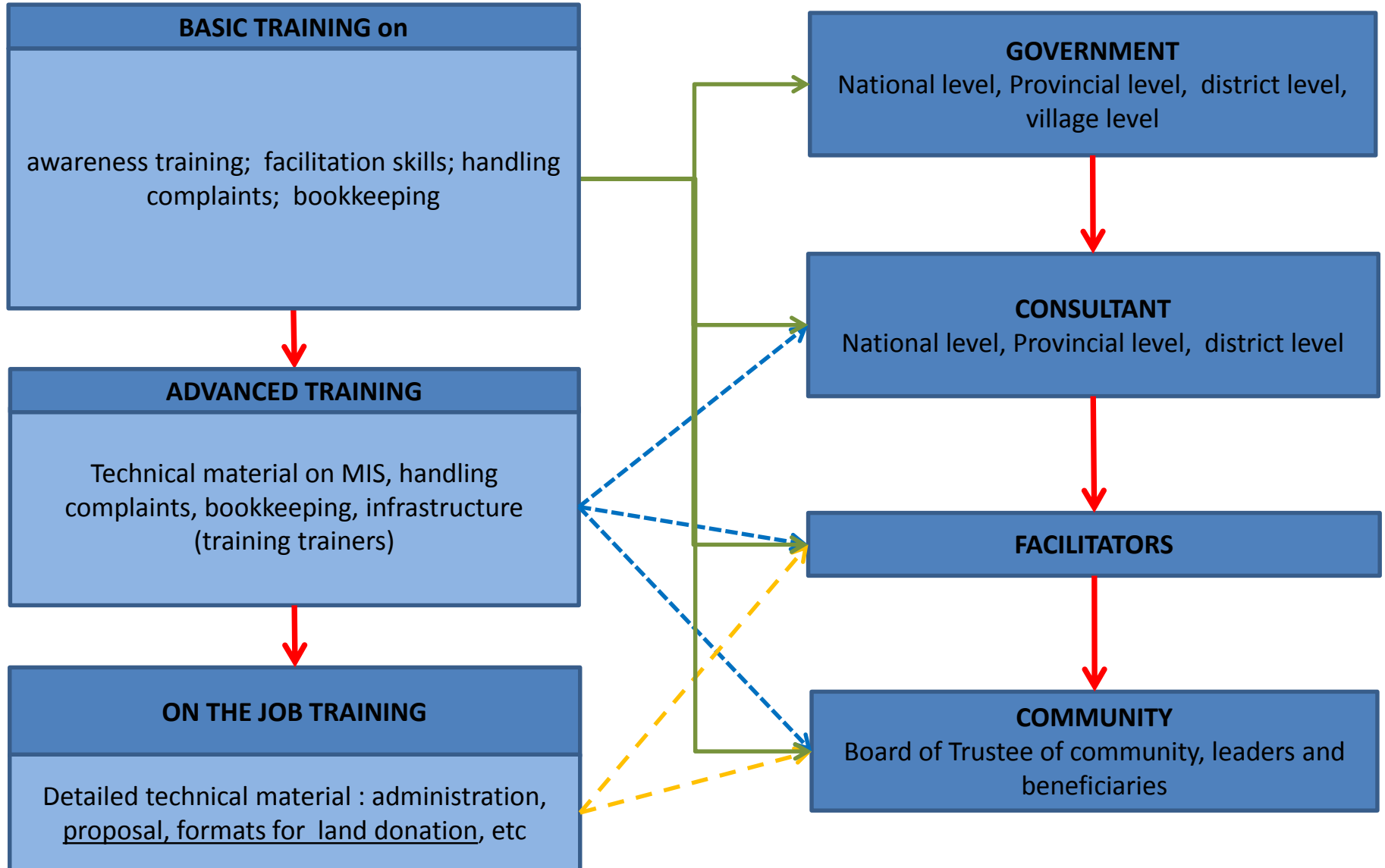
Capacity building



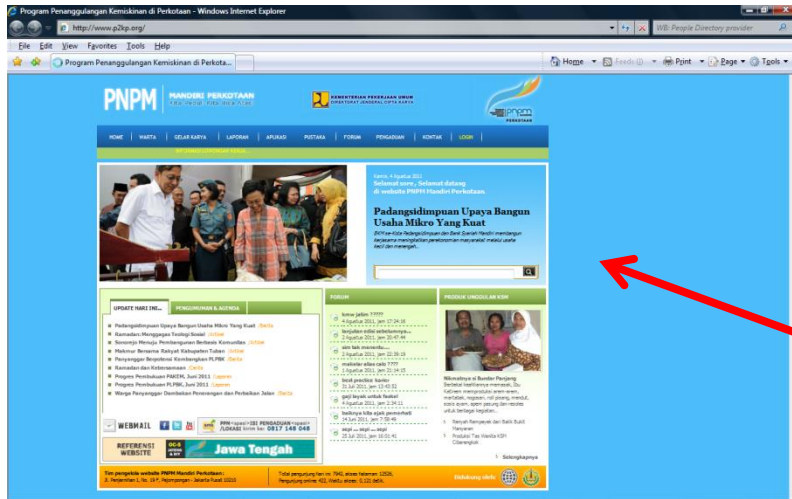
Project management, facilitators, village governments



TRAINING



Supervision and Oversight



Monitoring

- Web-based monitoring results (CDD project web site)
- Regular supervision by government and donor
- Regular meetings face to face and teleconference with facilitators, local govt., beneficiaries



Limited VLD: insufficient for proposed design need

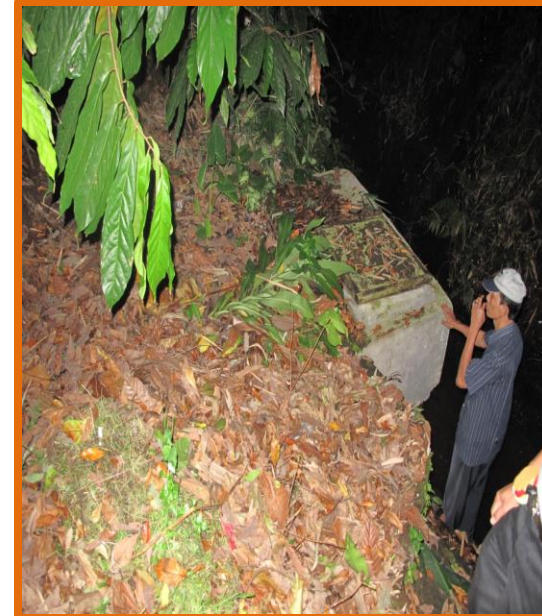


Drainage was built without proper alignment, may need to be deviated

Public latrine was built in very small area next to alley.



Public latrine was built too close to access road without proper safety divider



Spring water capturing facility was built into steep cliff

Successful VLD management in Indonesia (PNPM) CDD projects depended on:

- Strong management capacity involving consultants, facilitators, and local government
- Good project socialization and capacity building programs
- User-friendly project guidelines and formats
- Easy to use complaint handling
- Willingness to process the land ownership transfer when needed (individual to community)
- Good coordination between local government and project stakeholders

Different Community VLD Scenarios

